



## PENINGKATAN KEKUATAN MILITER DI KAWASAN DAN PERAN ASEAN REGIONAL FORUM

Simela Victor Muhamad\*)

### Abstrak

*Pada pertengahan Maret 2014, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan hasil kajiannya tentang terjadinya peningkatan kekuatan militer di dunia, termasuk di kawasan Asia. Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan keniscayaan, terlebih lagi jika ada faktor penggerak ke arah sana. Peningkatan kekuatan militer akan menjadi masalah jika disalahpersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan. Untuk menghindari kesalahpahaman, dibutuhkan transparansi dan kepercayaan strategis. ASEAN Regional Forum (ARF), sebagai forum keamanan multilateral di kawasan dapat berperan membangun transparansi dan kepercayaan strategis tersebut melalui pengembangan dialog dan konsultasi secara aktif dan konstruktif.*

### Pendahuluan

Di tengah ketegangan yang masih terlihat di sejumlah titik di Asia, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) dalam siaran persnya, 17 Maret 2014, melansir data soal kenaikan impor senjata dunia pada kurun 2009-2013. SIPRI adalah lembaga pemikir berbasis di Stockholm, Swedia, yang mengawasi perdagangan senjata dunia. Menurut data SIPRI, jumlah impor senjata konvensional utama dunia mengalami kenaikan sebesar 14 persen pada 2009-2013 dibandingkan kurun waktu sebelumnya, 2004-2008. Dari 10 besar negara importir senjata dunia, 5 berasal dari benua Asia, yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Korea Selatan, dan Singapura.

Di Asia, India memimpin dalam impor

senjata, di mana dalam kurun lima tahun mencapai 14 persen dari total impor senjata dunia. Jumlah ini mengalami kenaikan dua kali lipat dari presentase impornya pada 2004-2008 yang hanya sebesar 7 persen. Dengan presentase ini, impornya sekitar tiga kali lipat dari negara tetangganya, Tiongkok dan Pakistan. Pemasok utama senjata ke India pada 2009-2013 adalah Rusia, sekitar 75 persen, lalu diikuti Amerika Serikat (7 persen) dan Israel (6 persen). Sedangkan impor senjata Pakistan sebesar 5 persen, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok (54 persen) dan Amerika Serikat (27 persen).

Negara-negara Asia lain yang menunjukkan presentase impor besar adalah Korea Selatan dan Singapura. Korea Selatan, meskipun presentasinya besar, namun sebenarnya impor senjata mereka relatif

\*) Peneliti Madya Bidang Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id.



menurun dalam dua kurun waktu (2004-2008 dan 2009-2013), sedangkan Singapura mengalami sedikit peningkatan yang awalnya 2 persen menjadi hampir 3 persen. Untuk Korea Selatan, meskipun mengalami penurunan impor senjata namun anggaran pertahanannya mulai 2014, dan untuk lima tahun ke depan, meningkat menjadi 214 triliun Won.

Jepang, yang setelah Perang Dunia II kekuatan militernya dibatasi hanya untuk peran bela diri, juga berupaya meningkatkan kemampuannya dengan menaikkan anggaran militernya sebesar 5 persen untuk lima tahun ke depan (2014-2019) senilai 24,7 triliun Yen atau sekitar 240 juta dollar AS, termasuk di dalamnya akan melakukan pembelian jet tempur siluman (*Stealth*), kapal selam dan kapal canggih lainnya. Tiongkok, yang menaikkan anggaran militernya sebesar 12,2 persen pada 2014, tidak diragukan lagi akan terus memodernisasi dan meningkatkan kinerja angkatan bersenjatanya.

Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang belum surut, akibat tumpang tindih klaim teritorial, telah memaksa Vietnam dan Filipina yang terlibat sengketa dengan Tiongkok juga meningkatkan kapabilitas militernya. Vietnam membeli berbagai senjata dari Republik Ceko, Kanada, dan Israel serta kapal selam dari Rusia. Vietnam bahkan dikabarkan tengah memesan peluru kendali dari India. Sementara Filipina menargetkan pembelian dua kapal penyerang baru, dua helikopter anti-kapal selam, tiga kapal cepat patroli pantai, ditambah delapan kendaraan serbu amfibi hingga 2017. Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara di kawasan, juga terus meningkatkan kapabilitas militernya, di antaranya dengan menargetkan di tahun 2014 ini kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) pada rencana strategis I dapat mencapai 40-42 persen, yang di dalamnya juga mencakup penambahan alutsista TNI.

Data terbaru SIPRI dan perkembangan kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini seolah-olah memberi sinyal adanya peningkatan kekuatan militer, atau bahkan ada yang menyebutnya telah terjadi “perlombaan senjata” di antara negara-negara kawasan. Kajian singkat ini mencoba memahami apa yang menggerakkan terjadinya peningkatan kekuatan militer

tersebut, dan bagaimana seharusnya ARF, sebagai forum dialog penting di kawasan, berperan.

## Faktor Penggerak

Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan keniscayaan, terlebih lagi jika ada faktor penggerak ke arah sana. Artinya, peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada faktor yang menggerakkan ke arah itu. Dalam konteks kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor penggerak tersebut adalah adanya ketegangan regional, kebutuhan proyeksi kekuatan baru, pergeseran aktivitas militer Amerika Serikat (AS) ke Asia, dan semakin meningkatnya kehadiran Tiongkok di LCS.

Terkait dengan ketegangan regional, hal ini memang masih terus terjadi di kawasan yang disebabkan oleh, antara lain, belum tuntasnya masalah perbatasan yang tumpang-tindih di perairan teritorial, zona tambahan, dan juga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di antara sejumlah negara di kawasan. Dari 60 batas maritim yang dipermasalahkan, baru 20 persen yang dapat diselesaikan. Masalah perbatasan di perairan teritorial sangat sensitif karena hal ini menyangkut kedaulatan teritorial suatu negara, sementara masalah di ZEE menyangkut kepentingan energi dan sumber daya maritim suatu negara. Tumpang-tindih klaim teritorial di LCS, yang melibatkan Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN, tentunya juga menjadi bagian yang dapat memicu ketegangan regional.

Kekuatan militer suatu negara idealnya juga harus mampu merespons perubahan kebutuhan militer ke depan, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Hal ini bisa terjadi apabila kekuatan militer yang dibangun juga diproyeksikan ke arah pemenuhan kebutuhan dan tantangan itu. Kebutuhan dan kemampuan proyeksi kekuatan militer ini biasanya akan terlihat, misalnya, pada saat dilaksanakannya latihan operasi militer dan ketertiban di laut bersama di antara negara-negara kawasan. Di sini, masing-masing negara biasanya dapat mengukur kelebihan dan kekurangan kekuatan militernya. Apalagi, tantangan militer saat ini dan ke depan tidak saja menyangkut isu-isu tradisional, seperti

sengketa antarnegara tetapi juga isu-isu non-tradisional, seperti kejahatan lintas negara, misalnya.

Pergeseran aktivitas militer AS ke Asia, tampaknya juga telah memengaruhi negara-negara di kawasan untuk menyesuaikan diri atas kemampuan militernya. Setidaknya, hal itu dilakukan untuk bisa sedikit mengimbangi kehadiran militer AS yang kini diproyeksikan ke wilayah Asia. Negara-negara di kawasan, sebagai “tuan rumah”, tentunya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam melihat kehadiran militer AS di Asia. Mereka juga perlu menampilkan diri dengan “percaya diri” dalam menghadapi kekuatan militer AS sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Untuk itu, peningkatan kekuatan militer menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh negara-negara Asia sekaligus untuk membangun kemandirian dalam hal pengamanan wilayah kedaulatan negara.

Tampilnya Tiongkok, sebagai negara besar di kawasan dengan modernisasi militernya, sudah tentu juga turut memengaruhi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kekuatan militernya, terutama negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok di LCS dan Laut China Timur. Dalam beberapa tahun ini, Tiongkok terus memperlihatkan agresivitasnya di Asia Pasifik, terutama di LCS yang bersinggungan dengan beberapa negara anggota ASEAN dan Laut China Timur yang bersinggungan dengan Jepang. Tiongkok, dengan belanja militernya yang terus meningkat (kedua tertinggi setelah AS), terus membangun kekuatan militer yang lebih modern dan sudah tentu diproyeksikan untuk dapat menerobos lebih dalam ke perairan sengketa di LCS dan Laut China Timur.

Di luar faktor penggerak di atas, modernisasi militer atau peningkatan kekuatan militer yang terjadi di Asia, khususnya Asia Tenggara sesungguhnya juga merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonominya. Hal inilah yang terjadi pada lima negara utama di Asia Tenggara, yang disebut dengan *the Big Five*, yaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Selain itu, meluasnya cakupan keamanan regional yang harus dijaga, yang didasari oleh kepentingan nasional masing-masing, telah turut pula

mendorong negara-negara di kawasan untuk melakukan peningkatan kekuatan militernya agar dapat menjangkau cakupan wilayah keamaannya. Indonesia, Malaysia dan Singapura, misalnya, berkepentingan dengan keamanan Selat Malaka, begitu juga dengan negara-negara Asia lain yang menjadikan perairan strategis tersebut sebagai jalur pasokan energi dan perdagangan mereka.

## Peran ARF

Peningkatan kekuatan militer tentu saja menjadi hal yang sensitif sebab dapat menyebabkan *security dilemma* bagi negara lain. Adagium *security dilemma* setidaknya menegaskan dua hal. *Pertama*, upaya peningkatan kekuatan militer suatu negara kecenderungannya selalu dimaknai sebagai sarana pengembangan kekuatan ofensif oleh negara lain, dan *kedua*, sulit dibedakannya antara kekuatan defensif dengan kekuatan defensif. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya salah kalkulasi (*miscalculation*), salah penilaian (*misjudgment*) dan saling mencurigai (*mistrust*). Untuk menghindari hal tersebut maka negara-negara di kawasan perlu membangun rezim transparansi strategis dalam kerangka keamanan bersama (*common security*) melalui forum dialog. Forum untuk itu sebenarnya sudah ada di kawasan, terutama yang diinisiasi oleh ASEAN, yakni ASEAN *Regional Forum* (ARF). ARF merupakan forum dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF.

ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain, seperti AS, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Rusia dan Uni Eropa. Peserta ARF berjumlah 27 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN, 10 negara Mitra Wicara, serta beberapa negara di kawasan. Berdasarkan peserta ARF tersebut, sesungguhnya ARF dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dan menjaga stabilitas serta keharmonisan kawasan. ARF

perlu meningkatkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan *confidence building measures* (CBMs), *constructive engagement* dan *preventif diplomacy* di kawasan.

Langkah-langkah CBMs dan *preventif diplomacy* yang ditempuh oleh ARF, dalam rangka menciptakan dialog keamanan, dilakukan melalui kerja sama militer yang didasarkan atas dasar adanya komunikasi, transparansi, pembatasan (*limitation*) dan verifikasi. Hal tersebut perlu diimplementasikan dalam program-program, antara lain kerja sama dalam pengawasan senjata yang dipakai di lapangan dan kerja sama dalam perjanjian non-proliferasi; transparansi terhadap kekuatan militer yang dimilikinya atau yang digunakannya dengan mempublikasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan; kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan militer bersama, kursus-kursus pelatihan, saling mengunjungi fasilitas-fasilitas militer dan observasi pelatihan-pelatihan di antara mereka. Peran ini yang harus dilakukan oleh ARF dalam menyikapi isu peningkatan kekuatan militer di kawasan.

## Penutup

Peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan sebagai sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena sejumlah faktor yang secara rasional politis dapat menggerakkan ke arah itu. Yang menjadi inti permasalahan sebenarnya bukanlah peningkatan kekuatan militernya, tapi apa tujuan dari peningkatan kekuatan militer itu sendiri. Sejauh ini yang terlihat adalah peningkatan kekuatan militer tersebut, terutama di ASEAN, ditujukan untuk strategi penangkalan (*deterrence*) dan bersifat defensif, bukan ofensif. Melihat kondisi geografis negara-negara ASEAN yang pada umumnya memiliki wilayah laut, maka kepentingan untuk melindungi dan mengawasi wilayah laut menjadi prioritas yang harus dilakukan karena menyangkut kedaulatan negara. Terlebih lagi kawasan ini memiliki jalur perairan strategis yang menjadi urat nadi pelayaran internasional. Oleh karena itu, penguatan strategi penangkalan menjadi penting di sini untuk

mencegah gangguan keamanan di jalur perairan strategis ini.

Peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan akan menjadi masalah, jika disalahpersepsikan dan dicurigai sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan destabilisasi keamanan, dibutuhkan transparansi dan kepercayaan strategis, dan ARF, sebagai forum keamanan multilateral di kawasan, dapat berperan membangun transparansi dan kepercayaan strategis tersebut melalui pengembangan dialog dan konsultasi yang konstruktif. Kepercayaan strategis perlu terus dibangun di kawasan, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh DPR RI melalui diplomasi parlemen. DPR RI, melalui diplomasi parlemen, perlu juga memainkan peran untuk memajukan budaya damai, toleransi dan dialog di antara negara-negara kawasan, di samping mengingatkan pentingnya hal ini kepada pemerintah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

## Rujukan

1. Andrew T.H. Tan. 2014. *The Arms Race in Asia: Trend, Causes and Implications*. New York: Routledge.
2. Veeramalla Anjaiah, "China's SCS claim threatens RI sovereignty", *The Jakarta Post*, 17 Maret 2014.
3. "Anggaran Militer China Naik 12,2 Persen", *Kompas*, 6 Maret 2014.
4. "Sinyal Perlombaan Senjata di Asia", *Koran Tempo*, 19 Maret 2014.
5. "ASEAN mengemukakan keprihatinan atas zona maritim baru China", <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2014/01/30/asean-china-maritime>, diakses tanggal 19 Maret 2014.
6. "India Importir Senjata Utama Dunia", *Republika Online*, 17 Maret 2014. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/03/17/n2kuoa-india-importir-senjata-utama-dunia>, diakses tanggal 19 Maret 2014.
7. SIPRI Yearbook 2013, <http://www.sipri.org/yearbook/2013>, diakses tanggal 20 Maret 2014.
8. "South Asia and Gulf lead rising trend in arms imports, Russian exports grow, says SIPRI", [http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/AT\\_march\\_2014](http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/AT_march_2014), diakses tanggal 20 Maret 2014.